KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bamsoet Janjikan Anggaran - Sistem Minapadi Perlu Dikembangkan ke Skala Nasional
Tanggal : Sabtu, 16 Maret 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bamsoet Janjikan Anggaran

Sistem Minapadi Perlu Dikembangkan Ke Skala Nasional

KETUA DPR Bambang Soesatyo mendorong sistem minapadi (penggabungan budidaya ikan di sawah yang sedang ditanami padi) dikembangkan ke skala nasoinal. Dia menjanjikan, DPR akan menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem itu.

Dorongan itu disampaikan Bamsoet, sapaan Bambang, saat melakukan panen raya ikan nila dengan sistem minapadi, di Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah, kemarin. Panen raya tersebut dihadiri Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Anggota IV BPK Rizal Djalil, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Sumarjo Gatot Irianto, dan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto.

Lahan yang dipanen mencapai 5 haktere. Panen dipusatkan di salah satu petak dengan total produksi mencapai 1 ton. Di acara itu, Bamsoet itu menyalurkan bantuan perikanan ke lebih dari 10 kelompok masyarakat dari desa dan kecamatan di Purbalingga. Bantuannya antara lain 35 hektare sistem minapadi, 257.000 ekor benih nila, 105.000 ekor benih koi, 4.000 ekor calon induk nila, 1 paket biofok, 30.000 ekor benih ikan baung untuk restocking, 5 ton pakan ikan mandiri, dan 3 unit chest freezer.

Menurut politisi Partai Golkar ini, sistem minapadi sangat potensial dan menunggutungkan petani. "Selain menambah pendapatan, sistem minapadi yang mengintegrasikan pertanian dengan budidaya ikan nila juga bisa meningkatkan konsumsi protein masyarakat," ucapnya.

Atas hal itu, dia mendorong sistem itu tidak hanya dilaksanakan di Purbalingga. "Program minapadi juga perlu ditingkatkan ke skala nasional. Tak perlu takut dengan anggaran. DPR dengan senang hati akan menyiapkan," janji anggota Dewan dari dapil VII Jawa Tengah (Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen) ini.

Untuk APBN 2019, lanjutnya, DPR mengalokasikan Rp 5,48 triliun untuk KKP. Anggaran tersebut bukan cuma untuk mengembangkan perikanan laut. DPR memastikan KKP menggunakan anggaran tersebut juga untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar. "Seperti penyerahan bantuan yang dilakukan hari ini," tutur Bamsoet.

Dengan mengembangkan budidaya perikanan, Bamsoet berharap, konsumsi ikan nasional bisa meningkat. Dari 50,69 kilogram per kapita per tahun menjadi 54,49 kilogram per kapita per tahun. Dengan begitu, secara perlahan Indonesia bisa mengejar ketertinggalan konsumsi ikan dari negara tetangga. Misalnya Malaysia yang sudah mencapai 70 kilogram per kapita per tahun, Singapura 80 kilogram per kapita per tahun, dan Jepang yang sudah mendekati 100 kilogram per kapita per tahun.

"Mari budayakan mengkonsumsi ikan. Sebab, manfaatnya banyak sekali. Anak-anak kita bisa terhindar dari kelebihan atau kekurangan gizi, stunting, dan berbagai penyakit lainnya," ajaknya. ■ ONI